PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2026, Vol. 4, No. 1, pp. 36-42
E-ISSN: 3025-9452

Peran Media Sosial dalam Pembentukan Persepsi Publik terhadap Kebijakan Pemerintah

Ahmad Fikri Nugraha [1]✉, Siti Rahmawati Putri [2], Dwi Prasetyo Wibowo[3]
(1,2,3) Program Studi Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Abstrak: Media sosial telah menjadi ruang publik digital yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mempercepat penyebaran informasi dan opini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran media sosial dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah dengan meninjau pola komunikasi, sentimen publik, serta dinamika partisipasi politik digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis terhadap artikel-artikel ilmiah internasional dan nasional bereputasi yang relevan dengan topik media sosial, opini publik, dan kebijakan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai instrumen strategis dalam komunikasi kebijakan, sarana artikulasi aspirasi publik, serta alat pemantauan opini publik secara real-time. Namun, media sosial juga menghadirkan tantangan serius berupa disinformasi, polarisasi, manipulasi opini, dan pembentukan ruang gema yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi digital, tata kelola komunikasi publik yang adaptif, serta pemanfaatan analitik media sosial secara etis dalam siklus kebijakan publik. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan studi kebijakan publik dan komunikasi pemerintahan di era digital.

Article history:
Received: 28 January 2026
Revised: 05 February 2026
Accepted: 25February 2026
Published: 28 February 2026

Kata Kunci:
media sosial, opini publik, kebijakan pemerintah, komunikasi digital, partisipasi politik

Abstract: *Social media has emerged as a digital public sphere that significantly influences the formation of public perceptions of government policies. Advances in communication technology enable two-way interaction between governments and citizens while accelerating the dissemination of information and opinions. This article aims to comprehensively analyze the role of social media in shaping public perceptions of government policies by examining communication patterns, public sentiment, and dynamics of digital political participation. This study employs a qualitative approach through a systematic literature review of reputable international and national scholarly articles related to social media, public opinion, and public policy. The findings indicate that social media functions as a strategic instrument for policy communication, a platform for articulating public aspirations, and a real-time public opinion monitoring tool. However, social media also presents serious challenges, including disinformation, polarization, opinion manipulation, and the creation of echo chambers that may undermine democratic quality. These findings highlight the importance of digital literacy, adaptive public communication governance, and ethical use of social media analytics within the public policy cycle. This article contributes theoretically and practically to the development of public policy and government communication studies in the digital era.*

Keyword:
Social media, public opinion, government policy, digital communication, political participation

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Nugraha, A. F., Putri, S. R., & Wibowo, D. P. (2026). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Persepsi Publik terhadap Kebijakan Pemerintah. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *4*(1), 36-42. https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i1.457

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara mendasar lanskap komunikasi publik dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi antarindividu, melainkan telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan terbentuknya opini, sikap, dan persepsi kolektif

✉ *Corresponding author: ahmadfikrin@gmail.com*
Copyright © 2026, the author(s)

terhadap berbagai isu kebijakan pemerintah. Platform seperti Facebook, X, Instagram, TikTok, dan YouTube memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan tanpa batas geografis, sehingga memengaruhi cara masyarakat memahami, menilai, dan merespons kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah (Ceron & Negri, 2016; Naik, 2025). Transformasi ini menandai pergeseran signifikan dari pola komunikasi kebijakan yang bersifat satu arah menuju pola komunikasi yang lebih interaktif dan partisipatif.

Dalam konteks kebijakan publik, persepsi publik memiliki peran strategis karena menjadi faktor penentu legitimasi, keberterimaan, dan keberlanjutan suatu kebijakan. Persepsi publik tidak hanya dibentuk oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh cara kebijakan tersebut dikomunikasikan, diperdebatkan, dan direpresentasikan di ruang publik. Media sosial mempercepat proses pembentukan persepsi tersebut dengan menyediakan ruang bagi warga untuk mengekspresikan opini, berbagi pengalaman, serta memberikan dukungan maupun kritik secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah (Latif et al., 2024; Suhendra et al., 2024). Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai arena penting dalam siklus kebijakan publik, mulai dari tahap perumusan, implementasi, hingga evaluasi.

Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen utama dalam pemantauan opini publik dan pengelolaan komunikasi kebijakan. Ceron dan Negri (2016) menegaskan bahwa analisis opini publik berbasis media sosial memungkinkan pemerintah untuk memahami dinamika sikap masyarakat secara real time. Temuan ini diperkuat oleh meta-analisis yang menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran signifikan dalam seluruh tahapan siklus pembuatan kebijakan, khususnya dalam mengidentifikasi isu, mengukur sentimen publik, dan meningkatkan transparansi pemerintahan (Electronic Government, An International Journal, 2023). Dengan kata lain, media sosial tidak hanya mencerminkan opini publik, tetapi juga secara aktif membentuk dan memengaruhinya.

Namun demikian, peran strategis media sosial dalam pembentukan persepsi publik tidak terlepas dari berbagai tantangan serius. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa media sosial juga menjadi medium subur bagi penyebaran disinformasi, manipulasi opini, dan propaganda politik yang berpotensi mendistorsi pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah (Balcı & Keser, 2023; Ishrat, 2023). Algoritma platform digital cenderung memperkuat ruang gema dan gelembung filter, sehingga pengguna lebih sering terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan mereka, sementara perspektif alternatif menjadi terpinggirkan (Zhuang, 2025). Kondisi ini dapat memperdalam polarisasi sosial dan melemahkan kualitas diskursus kebijakan publik.

Dinamika pengaruh media sosial terhadap persepsi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh konteks politik, sosial, dan budaya di masing-masing negara. Studi di Ghana menunjukkan bahwa analisis sentimen media sosial mampu mengungkap sikap publik yang beragam terhadap kebijakan pemerintah dan mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Benson & Essah, 2025). Di Filipina, analisis komentar Facebook memperlihatkan bagaimana ekspresi spontan warga dapat menjadi sumber informasi penting bagi pembuat kebijakan, sekaligus menimbulkan isu etika terkait privasi data (Vizmanos et al., 2023). Sementara itu, penelitian di Ukraina dan Turki menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan luar negeri dan isu politik sensitif, terutama dalam situasi konflik dan krisis (Hatipoğlu et al., 2016; Kachkova & Sydorenko, 2025).

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, media sosial memiliki signifikansi yang semakin besar dalam proses komunikasi kebijakan dan partisipasi politik. Tingginya tingkat penetrasi media sosial menjadikan platform digital sebagai saluran utama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi kebijakan, menyampaikan aspirasi, serta membangun opini publik. Penelitian-penelitian terkini menegaskan bahwa media sosial dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam pemerintahan, terutama dalam kebijakan keterbukaan informasi publik (Suhendra et al., 2024). Namun, tanpa pengelolaan komunikasi yang strategis dan literasi digital yang memadai, media sosial juga berpotensi memperburuk kesalahpahaman publik terhadap kebijakan dan menurunkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Meskipun kajian mengenai media sosial dan kebijakan publik telah berkembang pesat, masih terdapat celah penelitian yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Sebagian besar studi cenderung berfokus pada konteks negara tertentu atau menggunakan pendekatan metodologis yang terfragmentasi, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai pola umum peran media sosial dalam pembentukan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, integrasi temuan lintas negara dan lintas pendekatan masih terbatas, khususnya dalam mengaitkan dimensi komunikasi kebijakan, sentimen publik, dan implikasi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran media sosial dalam pembentukan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah melalui kajian literatur sistematis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan studi kebijakan publik dan komunikasi pemerintahan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur sistematis untuk menganalisis peran media sosial dalam pembentukan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena konseptual dan empiris yang telah banyak diteliti sebelumnya, serta memungkinkan peneliti melakukan sintesis kritis terhadap temuan lintas konteks dan lintas disiplin tanpa melakukan pengumpulan data primer baru. Studi literatur sistematis dipandang relevan dalam penelitian kebijakan publik dan komunikasi politik karena mampu mengidentifikasi pola umum, kecenderungan temuan, serta celah penelitian dari kumpulan studi yang telah terpublikasi.

Sumber data penelitian ini berupa artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi yang secara eksplisit membahas media sosial, opini atau persepsi publik, serta kebijakan pemerintah. Seluruh artikel yang dianalisis merupakan bagian dari daftar pustaka penelitian ini dan dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: pertama, artikel membahas peran media sosial dalam konteks kebijakan publik atau pemerintahan; kedua, artikel memuat temuan empiris atau analisis konseptual yang relevan dengan pembentukan persepsi publik; dan ketiga, artikel diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang dapat ditelusuri secara daring. Artikel yang tidak relevan secara substantif atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dikeluarkan dari analisis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengorganisasian artikel ilmiah yang telah teridentifikasi sebelumnya. Setiap artikel dibaca secara menyeluruh untuk mengidentifikasi tujuan penelitian, konteks kajian, metode yang digunakan, serta temuan utama yang berkaitan dengan pengaruh media sosial terhadap persepsi publik atas kebijakan pemerintah. Untuk

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

menjaga konsistensi analisis, peneliti menggunakan lembar ekstraksi data yang berfungsi mencatat informasi kunci dari setiap artikel, termasuk fokus kebijakan, platform media sosial yang dikaji, serta implikasi terhadap tata kelola pemerintahan.

Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik. Pada tahap awal, peneliti mengelompokkan temuan penelitian ke dalam tema-tema utama, seperti fungsi media sosial dalam komunikasi kebijakan, peran media sosial dalam pembentukan dan ekspresi opini publik, serta risiko dan tantangan penggunaan media sosial dalam konteks kebijakan pemerintah. Tahap selanjutnya melibatkan proses interpretasi dan sintesis, yaitu membandingkan temuan antarstudi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kecenderungan umum. Analisis ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tetap konsisten dengan data yang dianalisis.

Keabsahan dan keterpercayaan penelitian dijaga melalui penerapan prinsip transparansi dan keterlacakan sumber. Seluruh temuan dan argumen yang disajikan dalam artikel ini merujuk secara langsung pada artikel-artikel yang tercantum dalam daftar pustaka, sehingga memungkinkan replikasi dan penelusuran ulang oleh peneliti lain. Selain itu, penggunaan berbagai studi dari konteks negara dan disiplin yang berbeda diharapkan dapat memperkuat validitas konseptual dan memperkaya perspektif analisis. Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai peran media sosial dalam pembentukan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis Temuan Empiris Studi Literatur

Hasil analisis terhadap studi-studi yang dikaji menunjukkan bahwa media sosial secara konsisten berperan sebagai medium utama dalam komunikasi kebijakan dan pembentukan persepsi publik. Tabel 1 menyajikan ringkasan temuan empiris dari beberapa penelitian utama yang merepresentasikan konteks negara dan pendekatan analisis yang berbeda. Secara umum, studi-studi tersebut menegaskan bahwa media sosial memungkinkan pemerintah memantau opini publik secara real time, sekaligus memberi ruang bagi warga untuk mengekspresikan dukungan, kritik, dan resistensi terhadap kebijakan pemerintah (Ceron & Negri, 2016; Benson & Essah, 2025).

Tabel 1. Ringkasan Temuan Empiris Studi tentang Media Sosial dan Persepsi Kebijakan Publik

PENULIS DAN TAHUN	KONTEKS NEGARA	PLATFORM/FOKUS KAJIAN	TEMUAN UTAMA
Ceron & Negri (2016)	Eropa	Media sosial politik	Media sosial efektif untuk memantau opini publik dan mobilisasi selama siklus kebijakan
Benson & Essah (2025)	Ghana	Diskusi media sosial	Analisis sentimen menunjukkan pengaruh kuat media sosial terhadap persepsi kebijakan
Vizmanos et al. (2023)	Filipina	Facebook	Komentar publik mencerminkan opini spontan dan beragam terhadap kebijakan pemerintah

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Kachkova & Sydorenko (2025)	Ukraina	Multi-platform	Media sosial membentuk persepsi kebijakan dalam konteks konflik dan krisis
Hatipoğlu et al. (2016)	Turki	Twitter	Sentimen politik di media sosial memengaruhi persepsi kebijakan luar negeri

Pola Umum Peran Media Sosial dalam Pembentukan Persepsi Publik

Analisis lintas studi menunjukkan adanya beberapa pola utama. Pertama, media sosial berfungsi sebagai saluran komunikasi kebijakan yang mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan visibilitas kebijakan pemerintah. Kedua, media sosial menjadi arena ekspresi sentimen publik yang mencerminkan sikap masyarakat terhadap kebijakan, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik terbuka (Latif et al., 2024; Naik, 2025). Ketiga, interaksi di media sosial memungkinkan terbentuknya partisipasi digital yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok yang sebelumnya kurang terwakili dalam proses politik formal.

Risiko Disinformasi dan Polarisasi dalam Konteks Kebijakan

Meskipun memberikan peluang partisipasi yang lebih besar, berbagai studi juga menyoroti risiko serius penggunaan media sosial dalam pembentukan persepsi kebijakan. Balcı dan Keser (2023) serta Ishrat (2023) menunjukkan bahwa disinformasi, manipulasi opini, dan propaganda politik dapat mendistorsi pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Zhuang (2025) yang menekankan peran algoritma platform digital dalam memperkuat ruang gema dan mempersempit paparan terhadap perspektif alternatif. Kondisi ini berpotensi memperdalam polarisasi dan menurunkan kualitas diskursus kebijakan publik.

Perbandingan Lintas Konteks Negara

Perbandingan lintas konteks menunjukkan bahwa pengaruh media sosial terhadap persepsi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial masing-masing negara. Di negara dengan tingkat kebebasan informasi yang tinggi, media sosial cenderung memperkuat transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Sebaliknya, dalam konteks konflik atau polarisasi politik yang kuat, media sosial sering kali menjadi arena pertarungan narasi yang intens dan berisiko memicu fragmentasi opini publik (Hatipoğlu et al., 2016; Kachkova & Sydorenko, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa dampak media sosial tidak bersifat universal, melainkan kontekstual.

Implikasi terhadap Tata Kelola Kebijakan Publik

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan bahwa media sosial merupakan instrumen strategis sekaligus ambivalen dalam tata kelola kebijakan publik. Di satu sisi, media sosial meningkatkan keterlibatan publik, transparansi, dan responsivitas pemerintah. Di sisi lain, tanpa pengelolaan komunikasi yang tepat, media sosial dapat memperburuk mispersepsi dan menurunkan kepercayaan publik. Diagram 1 menggambarkan sintesis peran utama media sosial dalam pembentukan persepsi publik berdasarkan temuan empiris studi literatur.

Diagram 1. Sintesis Peran Media Sosial dalam Pembentukan Persepsi Publik terhadap Kebijakan Pemerintah

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

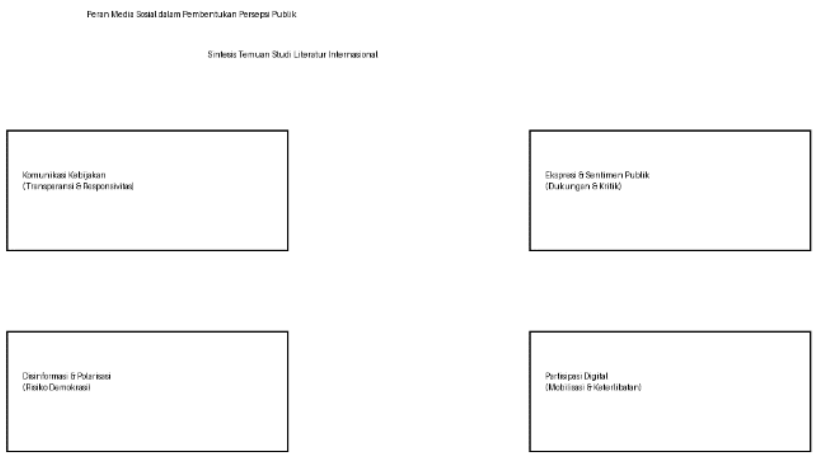

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan sintesis temuan studi literatur, media sosial berfungsi sebagai saluran komunikasi kebijakan yang mempercepat distribusi informasi, memperluas jangkauan pesan pemerintah, serta membuka ruang partisipasi publik dalam merespons kebijakan secara langsung. Interaksi digital yang terjadi di berbagai platform memungkinkan pemerintah untuk memantau opini publik secara real time dan memahami dinamika dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa peran media sosial bersifat ambivalen. Di samping memperkuat transparansi dan keterlibatan publik, media sosial berpotensi memicu disinformasi, polarisasi opini, dan distorsi persepsi kebijakan apabila tidak dikelola secara strategis. Perbedaan konteks politik dan sosial antarnegara turut memengaruhi sejauh mana media sosial berkontribusi positif atau justru memperumit komunikasi kebijakan publik.

Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya strategi komunikasi pemerintah yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada klarifikasi informasi di ruang digital. Pemerintah perlu memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai alat penyebaran kebijakan, tetapi juga sebagai sarana dialog yang konstruktif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam peran algoritma platform dan literasi digital publik dalam membentuk persepsi kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Balcı, A. N., & Keser, A. (2023). *The impact of social media in the formation process of public policies: Disinformation, manipulation, and propaganda*. **Sosyolojik Düşün**, 2023. https://doi.org/10.37991/sosdus.1322106

Benson, A., & Essah, R. (2025). *Sentiment analysis of Ghanaian social media discussion on government policy*. **International Journal of Research and Innovation in Applied Science**, 10(7). https://doi.org/10.51584/ijrias.2025.100700067

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Ceron, A., & Negri, F. (2016). *The "social side" of public policy: Monitoring online public opinion and its mobilization during the policy cycle*. **Policy & Internet, 8**(2), 131–147. https://doi.org/10.1002/poi3.117

Dzisah, W. S. (2023). *Public policymaking in the age of new media*. In **International series on public policy**. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33005-6_13

Gupta, K. (2024). *Role of media and civil society in shaping public policy*. **International Journal of Advanced Research, 12**(1), 102–110. https://doi.org/10.21474/ijar01/18257

Hasanuddin, M., Khodijah, S., & Rizki, C. A. (2025). *Analysis of the role of social media in shaping public opinion on social issues*. **Journal of Communication Studies and Artificial Intelligence, 1**(1). https://doi.org/10.64803/jocsaic.v1i1.1

Hatipoğlu, E., Gökçe, O. Z., Dinçer, B., et al. (2016). *Sosyal medya ve Türk dış politikası: Kobani tweetleri üzerinden Türk dış politikası algısı*. **Uluslararası İlişkiler Dergisi**, 13(52), 89–110. https://doi.org/10.33458/UIDERGISI.463090

Ishrat, J. (2023). *Changing public opinion and politics in the social media era*. **Global Mass Media Review, 8**(1), 45–60. https://doi.org/10.31703/gmmr.2023(vi-i).04

Kachkova, O., & Sydorenko, T. (2025). *The role of social media in shaping public opinion: Examples from Ukraine*. **Media Studies and Political Communication**, 1(4). https://doi.org/10.34132/mspc2025.01.04.09

Latif, D. A., Samad, M. A., Rinawulandari, R., et al. (2024). *Social media in shaping public opinion roles and impact: A systematic review*. **Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 40**(2), 215–230. https://doi.org/10.17576/jkmjc-2024-4002-12

Liu, Y., & Xu, C. (2019). *Nudged by the public: Social influence affects citizens' judgments on policy performance*. **Journal of Public Administration Research and Theory, 29**(4), 572–588.

Naik, S. D. (2025). *The influence of social media on public opinion in the digital age*. **EPRA International Journal of Multidisciplinary Research, 11**(6), 88–94. https://doi.org/10.36713/epra22452

Nurmandi, A., & Satria, T. (2024). *Behavioral patterns of social media users toward policy: A scientometric analysis*. **Policy, Governance and Reform, 8**(2). https://doi.org/10.30589/pgr.v8i2.902

Parthama, I. G. N., Pastika, I. W., Netra, I. M., et al. (2025). *From public opinion to digital resistance: The role of social media in contesting government policies*. **International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 4**(6). https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i6.1617

Shveeva, E. I., Verstjuk, A. D., & Meshcherina, D. G. (2025). *Роль социальных медиа в формировании государственной политики (включая экономический аспект)*. **Vestnik MGUTU: Applied Scientific Disciplines**, 43(68). https://doi.org/10.69540/2949-4079.2025.43.68.007

Suhendra, S., Suprianto, B., & Marhamah, F. S. (2024). *Mengurai potensi media sosial dalam memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik*. **Jurnal Media Administrasi, 9**(1). https://doi.org/10.56444/jma.v9i1.1540

Swastiningsih, S., Aziz, A., & Dharta, Y. (2024). *The role of social media in shaping public opinion: A comparative analysis of traditional vs. digital media platforms*. **Frontiers in Media and Communication**, 5. https://doi.org/10.59613/fm1dpm66

Toplu, M. (2018). *Kamu politikalarının oluşumu ve uygulanmasında medya/sosyal medyanın rolü*. **Journal of Social Policy Studies**, 18(2), 201–220.

Vizmanos, J. F., Siar, S., Albert, J. R., et al. (2023). *Like, comment, and share: Analyzing public sentiments of government policies in social media*. **Development Policy Review**, 41(S1). https://doi.org/10.62986/dp2023.33

Yang, Z. (2024). *Take India as an example to explore the role of media in policy communication*. **Journal of Education, Humanities and Social Sciences**, 10. https://doi.org/10.54097/h0w56908

Zhuang, Y. (2025). *Public opinion formation in the age of social media algorithms*. **Lecture Notes in Education Psychology and Public Media**. https://doi.org/10.54254/2753-7048/2025.nd26517

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.